Ekonomis: Journal of Economics and Business
Vol 8, No 1 (2024): Maret, 911-918
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122
Webite: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com
ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1809

Peran Program Dumisake Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM dan Perekonomian Masyarakat Provinsi Jambi Masa Covid-19

Faradilla Herlin*, Ovi Kusmaladewi, Rian Dani
Universitas Muhammadiyah Jambi
*Correspondence: faradilla.surya@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program dumisake mempengaruhi pendapatan UMKM dan perekonomian masyarakat yang tinggal di Provinsi Jambi secara umum pada masa COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Dinas Koperasi UMK Provinsi Jambi dijadikan sebagai tempat penelitian. Program Dumisake yang merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi digunakan untuk menentukan lokasi penelitian guna mengkaji program bantuan permodalan bagi UMKM. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada penerima bantuan modal UMKM Program Dumisake Pemprov Jambi, diperoleh data primer. Catatan hukum dan peraturan, RPJMD Provinsi Jambi 2021–2026, Renstra dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, serta UMK Provinsi Jambi menjadi data pendukung penelitian dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pelaku UMKM di Provinsi Jambi yang mendapat manfaat dari dukungan permodalan Program Dumisake. Reduksi Data, Penyajian Data (Penyajian Data), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion) merupakan metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi. UMKM ini menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Dalam membantu pelaku UMKM di Provinsi Jambi dalam mengembangkan usahanya, Program Pemulihan Ekonomi Pemprov Jambi terbukti cukup bermanfaat dalam menyediakan produk dan peralatan bagi mereka. Program bantuan tersebut memiliki tiga (tiga) tujuan utama: mencapai pemulihan ekonomi; meningkatkan kapasitas UMKM menjadi tangguh dan mandiri; dan menerapkan saluran bantuan yang efisien, transparan, efektif, dan tepat sasaran. Dinas Koperasi & UMKM (Pemerintah) dan pelaku UMKM menjadi dua pemain berikutnya yang terlibat dalam program dukungan terhadap pelaku UMKM.

Kata kunci : Dumisake, Pendapatan, UMKM.

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine how the Dumisake Programme affected the MSME income and the general economy of the people living in the Province of Jambi in COVID-19. This study uses a qualitative method and is descriptive in nature. The Cooperatives Service, UMK, Jambi Province served as the research site. The Dumisake Programme, a priority programme for the Jambi Provincial Government, was used to determine the research location to examine the capital assistance programme for MSMEs. The program's goals are to enhance the regional economy, lower rates of poverty and unemployment, and ultimately improve community welfare. Through the distribution of questionnaires and in-person interviews with MSME capital assistance grantees under the Jambi Provincial Government's Dumisake Programme, primary data was gathered. Legal and regulatory records, the 2021–2026 Jambi Province RPJMD, the Strategic Plan and Work Plan of the Cooperative Service, and the Jambi Province UMK serve as research supporting data for this study. Researchers conducted direct interviews with MSME players in Jambi Province who benefited from capital support under the Dumisake Programme. Data Reduction, Data Display (Data Presentation), and Conclusion Drawing/Verification (Conclusion) were the methods used for data analysis in this study. The study's findings demonstrate that the Covid-19 Pandemic had an impact on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) that were given support by the Jambi Provincial Government. These MSMEs considered the assistance to be highly beneficial for business development, which boosted their revenue. When it comes to helping MSME players in Jambi Province with their business growth, the Jambi Provincial Government's Economic Recovery Programme has shown to be quite beneficial in providing them with products and equipment. The assistance programme has three (three) primary objectives: achieving economic recovery; enhancing MSMEs' capacity to become resilient and independent; and putting in place efficient, transparent, effective, and targeted help channels. The Cooperatives & MSMEs Service (Government) and MSME actors are the next two players engaging in the support programme for MSME actors.

Keywords **:** Dumisake, Revenue, MSMEs

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memberikan stimulus guna mendukung kelangsungan sektor UMKM di era pandemi dengan segala keterbatasan yang ada

agar mampu mendorong stabilitas perekonomian sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan, merupakan wujud nyata pemerintah. bantuan untuk sektor UMKM. karena kemungkinan banyak orang akan kehilangan mata pencahariannya, yang berdampak pada lingkungan sosial budaya, politik, dan keamanan (Sari & Solihati, 2021). Wabah Covid-19 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yaitu sebesar 3,5% pada tahun 2020 dan 3,66% pada tahun 2021. Kemiskinan dan pengangguran terkena dampak langsung dari terhentinya pembangunan ekonomi tersebut. Perekonomian yang lemah dan kendala output menyebabkan industri produksi memangkas staf di banyak posisi, sehingga mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,13% di Provinsi Jambi pada tahun 2020.

Pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi pemberdayaan dan meningkatkan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Mustafa, 2021). Tujuan dari stabilisasi perekonomian lokal adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang menguntungkan, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup Jambi. Di Provinsi Jambi, koperasi dan UMKM merupakan industri penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha yang menguntungkan dan pengembangan ekonomi masyarakat (Nuraeni, 2018). Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah provinsi di daerah. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021–2026: (1) mewujudkan koperasi modern dan berkualitas; dan (2) mewujudkan UMKM dan pengusaha naik kelas yang mampu bersaing di pasar lokal dan internasional (Rijal, 2022).

Tabel 1
Data Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Tahun 2017 – 2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi	Unit	3.896	3.534	3.551	3.725	3.838
Koperasi Aktif	Unit	1.952	2.504	2.529	2.185	2.045
Jumlah Pengurus	Orang	11.250	10.522	10.073	31	1.297
Jumlah Anggota	Orang	361.413	362.253	362.253	50.164	111.092

Sumber: Renstra Dinas Koperasi, UMK Tahun 2021-2026

Jumlah koperasi masih terus bertambah, seperti yang ditunjukkan tabel ini. Informasi ini sangat penting untuk diketahui oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam mempersiapkan program Pembinaan dan Pembinaan Koperasi. Harus ada kesempatan bagi generasi muda untuk memulai koperasi sendiri ketika mereka terjun di sektor ekonomi (Hadi dkk, 2023). Untuk memanfaatkan potensi digital saat ini dan membantu koperasi menjadi lebih kuat, hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan bisnis yang membantu koperasi melalui ekosistem digital.

Tabel 2.
Data Jumlah dan Jenis UMKM Dalam Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Jumlah UMKM	100.898	104.155	138.470	72.126	165.168
a. Usaha Mikro	87.669	90.845	123.160	59.197	152.477
b. Usaha Kecil	12.674	12.402	14.170	11.778	10.271
c. Usaha Menengah	555	908	1.140	1.151	2.420
2. Jumlah Tenaga Kerja	175.765	184.124	188.124	101.972	275.577

Sumber: Renstra Dinas Koperasi, UMK Tahun 2021-2026

Pemprov Jambi menelusuri pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta jumlah pekerjanya pada tahun 2017 hingga 2019. Data menunjukkan terdapat 114.598 UMKM dan

182.671 orang yang dipekerjakan oleh mereka. Namun pada tahun 2020, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turun menjadi 72.126 dengan jumlah pekerja sebanyak 101.972 orang. Penyebaran virus COVID-19 secara global menyebabkan penurunan ini. Sementara pada tahun 2021, UMKM yang beroperasi sebanyak 165.168 orang dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 275.577 orang. Bantuan permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu cara Pemerintah Provinsi Jambi dalam menangani dampak sosial; Program ini disebut Dumisake, dan tujuannya adalah untuk membantu perekonomian provinsi pulih lebih cepat dan mengurangi kemiskinan (Simanjorang & Rahmawati, 2023). Dalam rangka Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan Berupa Uang dan/atau Barang dan Jasa, terdapat ketentuan bantuan permodalan bagi UMKM. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatannya sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Meneliti keadaan alam (daripada melakukan eksperimen) dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama adalah tujuan dari teknik deskriptif kualitatif postpositivis. Hasil didasarkan pada analisis data induktif dan kualitatif, termasuk perolehan data dengan menggunakan triangulasi (kombinasi). Interpretasi, bukan kesimpulan luas, merupakan fokus penelitian kualitatif (Noor, 2011). Dinas Koperasi UMK Provinsi Jambi akan dijadikan sebagai tempat penelitian. Program Dumisake, yang merupakan prioritas utama Pemerintah Provinsi Jambi, berupaya untuk meningkatkan perekonomian daerah, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diputuskan untuk melakukan penelitian untuk menganalisis program bantuan permodalan bagi UMKM di Provinsi Jambi. Satu bulan yaitu tanggal 26 Juni sampai dengan 25 Juli 2023 merupakan jangka waktu penelitian.

Data penelitian ini berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap Program Dumisake yang dikaitkan dengan aspek Pendapatan UMKM dan Perekonomian Masyarakat. Sedangkan penelitian ini didasarkan pada sampel pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi yang telah menerima bantuan dana. Responden Program Dumisake, yang memberikan bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Jambi, Indonesia, disurvei dan diwawancarai untuk mengumpulkan data primer. Sedangkan data sekunder berupa UMK Provinsi Jambi, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, serta RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026.

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Menurut Sahputra & Srihardjono (2019), teks naratif, grafik, matriks, jaringan, dan bagan adalah cara penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif. Penyajian data adalah proses mendeskripsikan sekumpulan data terorganisir yang memungkinkan adanya potensi membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Mengingat permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan berjalannya peneliti di lapangan, maka ada kemungkinan kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut tidak akan mampu menjawab rumusan masalah semula (Yuliani, 2018).

HASIL

Menurut Kadeni (2020), usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan 3 (tiga) fungsi utama dalam perekonomian, yaitu:

1. Sebuah cara untuk menyamakan kedudukan ekonomi, karena UMKM telah tersebar di seluruh negeri, bahkan hingga ke lokasi-lokasi terpencil, sehingga memungkinkan penduduk setempat untuk mendapatkan penghidupan yang layak tanpa harus pulang pergi ke ibu kota.
2. Jalan keluar dari kemiskinan, karena UMKM dapat mempekerjakan banyak orang.
3. Peluang bagi negara untuk memperoleh pendapatan, karena UMKM mampu memproduksi barang dengan pasar internasional maupun dalam negeri.

Dalam upaya mendongkrak perekonomian Indonesia, pemerintah fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Lumampow dkk (2021), usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) merupakan suatu kegiatan komersial yang dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja yang tersedia, serta berbagai layanan ekonomi bagi masyarakat. Hal ini juga dapat membantu mewujudkan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan perekonomian. Sebagaimana terlihat pada tabel terlampir, Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi melaporkan bahwa UMKM mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 93.371 unit pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 tercatat penurunan sebanyak 66.344 unit akibat dampak dari pandemi COVID-19.

Tabel 3
Jumlah UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Periode Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	710	32.202	5.405	12.400	7.468
Merangin	2.844	3.274	2.160	4.956	6.121
Sarolangun	4.283	4.338	1.615	3.705	2.627
Batanghari	4.049	5.090	5.580	12.796	17.611
Muaro Jambi	1.757	1.757	18.350	42.105	41.234
Tanjung Jabung Timur	56.840	56.002	8.300	19.046	8.698
Tanjung Jabung Barat	9.719	8.013	3.560	8.390	19.046
Tebo	2.137	1.411	550	1.268	8.370
Bungo	16.142	6.848	1.475	3.387	12.489
Kota Jambi	21.613	10.763	20.832	47.813	50.747
Kota Sungai Penuh	23.895	8.772	4.299	9.631	9.631
Total Provinsi Jambi	143.989	138.470	72.126	165.497	184.042

Sumber: Renstra Dinas Koperasi, UMK Tahun 2021-2026

Tabel 3 menunjukkan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Jambi meningkat dari 143.989 unit pada tahun 2018 menjadi 184.042 unit pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 78,24%. Usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Jambi juga menghadapi dampak pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, dengan penurunan pendapatan bahkan ada yang gulung tikar. Data Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi menunjukkan ada 11.454 unit UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Menurut Tunut & Sakti (2023), pandemi COVID-19 berdampak pada sembilan industri berbeda di Provinsi Jambi: transportasi, penginapan, jasa korporasi, jasa lainnya, bangunan dan real estate, administrasi pemerintahan, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar. dan perdagangan eceran. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa epidemi COVID-19 telah memperlambat pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi.

Tabel 4
Jumlah Tenaga Kerja pada UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Periode Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	1.365	32.202	6.346	18.374	12.187
Merangin	37.644	6.506	4.650	13.272	14.564
Sarolangun	9.264	9.392	3.358	9.277	5.292
Batanghari	10.561	12.658	7.350	21.147	35.324
Muaro Jambi	5.924	5.924	15.107	43.123	119.674
Tanjung Jabung Timur	56.840	55.825	4.660	13.392	10.806
Tanjung Jabung Barat	9.719	10.042	3.600	10.349	7.388
Tebo	2.137	5.689	990	1.984	755
Bungo	16.142	16.142	1.021	2.933	755
Kota Jambi	21.613	21.613	50.717	143.439	149.629
Kota Sungai Penuh	12.895	12.954	4.173	12.279	12.279
Total Provinsi Jambi	184.104	188.947	101.972	289.569	370.831

Sumber: Renstra Dinas Koperasi, UMK Tahun 2021-2026

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang cukup besar dapat ditampung oleh UMKM di Provinsi Jambi. Dari tahun 2018 hingga 2022, jumlah pekerja meningkat sebanyak 195.066 orang atau sebesar 210,98% berdasarkan statistik pada tabel. Kemampuan menyerap tenaga kerja akan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah UMKM (Azhari, 2021). Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa tingkat serapan tenaga kerja di sektor UMKM berbanding lurus dengan jumlah unit UMKM. Di antara 206 UMKM yang disurvei Katadata Insight Center (KIC) di Jabodetabek, 82,9% melaporkan dampak negatif pandemi dan 5,9% melaporkan pertumbuhan positif. Sebanyak 63,9% UMKM yang terkena dampak mengalami penurunan omzet sebesar 30% sebagai akibat langsung dari penyakit pandemi ini. Namun, hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan pendapatan. Balitbang Kabupaten Buleleng (2022) melakukan penelitian tambahan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kabupaten tersebut, dan temuannya menunjukkan adanya peningkatan kesulitan modal sebesar 25,7%. Hal ini semakin mendukung gagasan bahwa Covid-19 berdampak besar terhadap permodalan UMKM di kabupaten tersebut. Kesimpulan studi ini bahwa UMKM mengalami penurunan pendapatan sejalan dengan studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2020). Banyak hal yang perlu dilakukan para pelaku UMKM agar usahanya tetap bertahan dalam kondisi seperti ini.

Melalui program Dumisake, Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan dana untuk mengatasi dampak sosial masyarakat. Menurut Friska (2023), program Dumisake dirancang untuk membantu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemulihan ekonomi di Provinsi Jambi. Upaya menjaga operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19 sangat terbantu dengan adanya Program Dumisake di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Kajian ini fokus pada sejumlah program yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi.

Program Bantuan PEN bagi Pelaku UMKM

Menanggapi epidemi Covid-19, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, atau disingkat PEN. Sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali perekonomian, pemerintah meluncurkan program PEN untuk memerangi pandemi Covid-19 dan bahaya lain yang lebih serius terhadap sistem keuangan dan perekonomian negara (Abubakar & Handayani, 2021). Lima (5) kegiatan yang termasuk dalam program PEN adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan strategi pengelolaan perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara dan perseroan terbatas lainnya merupakan salah satu cara untuk menjauhkan aset negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau mencari sumber alternatif. modal.
2. Untuk melakukan penempatan dana, pemerintah mentransfer sejumlah uang ke bank komersial yang ditunjuk dan kemudian membebankan tingkat bunga tertentu kepada bank tersebut.
3. Investasi Pemerintah; praktik mengalokasikan sebagian anggaran suatu negara atau sumber daya keuangan jangka panjang lainnya kepada bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan ekonomi, sosial, atau lainnya melalui pembelian saham, obligasi, atau sarana investasi lainnya.
4. Jaminan adalah jaminan bahwa penjamin akan melunasi utang-utang yang dijanjikan kepada pihak yang menerima jaminan.
5. Belanja negara menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengeluaran dan kebijakan pemerintah, negara mensubsidi bunga mereka yang berhutang pada bank, perusahaan pembiayaan, dan lembaga lain yang memenuhi syarat untuk program kredit pemerintah. Bantuan pemerintah dan program jaring pengaman sosial juga mendapat subsidi. Sedangkan yang mempunyai utang ke perbankan adalah UMKM atau koperasi yang telah memenuhi kriteria lain dan memiliki plafon kredit sebesar sepuluh miliar rupiah. Program PEN dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai sarana pemberian bantuan terhadap program pemerintah federal. Keputusan ini berdasarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor: 25/INGUB/TAPD/2021, tanggal 19 Juli 2021, yang membahas tentang refocusing anggaran kegiatan dan subkegiatan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, Program dukungan PEN terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Jambi didanai melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu UMKM dalam menjalankan perusahaan mereka selama krisis pandemi Covid-19. Bantuan keuangan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di sebelas kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dalam Program PEN Provinsi Jambi. Dua ratus dua puluh pelaku usaha dari sebelas kabupaten atau kota berbeda tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 963/Kep.Gub/Diskop.UKM/2021 yang diterbitkan Gubernur Jambi pada 30 November 2021.

Tabel 5
Rekapitulasi Penerima Bantuan PEN bagi Pelaku UMKM Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima paket
1	Kerinci	37
2	Merangin	20
3	Sarolangun	17
4	Batanghari	18
5	Muaro Jambi	17
6	Tanjung Jabung Timur	18
7	Tanjung Jabung Barat	15
8	Tebo	16
9	Bungo	17
10	Kota Jambi	18
11	Kota Sungai Penuh	27
Jumlah Total Penerima		220

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Tahun 2023

Untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memenuhi persyaratan tertentu, APBD Provinsi Jambi menyediakan barang-barang seperti gerobak, blender dan kompor gas (Ramadano, 2022). Komponen dukungan semacam ini adalah:

1. Gerobak, tempat kerja portabel, atau etalase toko yang dibuat dari baja aluminium ringan dalam berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan individu. Ini adalah gerobak yang terbuat dari wadah rumah aluminium.
2. Blender adalah sejenis alat pengolah makanan yang menggabungkan wadah dengan pisau berputar untuk tujuan memblender, mencampur, menggiling, atau melunakkan bahan. Ini adalah perangkat listrik. (Model Blender: Miyako BL152 GF).
3. Kompor gas adalah peralatan memasak yang efektif karena menghasilkan suhu tinggi di dalam ruang tertutup dan terisolasi yang menggunakan bahan bakar gas untuk memanaskan makanan. (kompor gas dengan satu pembakar untuk keperluan industri).

Adapun persyaratan dan prosedur dan tata cara pengajuan bantuan PEN bagi UMKM yang memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Memiliki Usaha Mikro minimal 6 Bulan dan maksimal 3 Tahun;
3. Membuat Proposal Usaha;
4. Memiliki Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga;
5. Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
6. Memiliki IUMK atau NIB atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau Desa;
7. Surat Pernyataan dari Pelaku Usaha Belum pernah menerina bantuan dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi maupun Organisasi Perangkat Daerah lainnya;
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, bersedia menandatangani surat pernyataan mutlak dari Pelaku Usaha UMKM Penerima Bantuan Program PEN
9. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri.

Pelaku usaha di Provinsi Jambi yang termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhak mengajukan permohonan pendanaan PEN, yang prosesnya dimulai dengan mengajukan proposal kepada Gubernur Jambi melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Selain itu, evaluasi, verifikasi, dan penerbitan rekomendasi/dukungan terhadap calon penerima bantuan PEN akan ditangani oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Tim mengkaji dan memverifikasi data calon penerima bantuan sebelum Kepala Dinas memutuskan siapa yang akan diserahkan kepada Gubernur Jambi sebagai penerima bantuan.

Berdasarkan beberapa temuan, dapat disimpulkan bahwa penambahan modal usaha berupa bantuan modal usaha menjadi harapan besar bagi para pelaku UMKM. Program Bantuan Permodalan kepada UMKM ini sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 yang akan dimulai pada tahun 2022 berupa bantuan modal usaha kepada UMKM/Industri Rumah Tangga/startup tunai melalui

Bank Jambi kepada 1.500 UMKM/Tahun. Jika penyaluran bantuan dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan bantuan dari Pemprov Jambi dapat memberikan multi-flyer effect bagi banyak pelaku UMKM di Provinsi Jambi. Bantuan yang diberikan tidak hanya dinikmati oleh para pelaku UMKM penerima bantuan saja, namun manfaatnya juga dapat dirasakan secara terukur oleh lebih banyak lagi pelaku UMKM mitra yang ditunjuk. Sementara bagi Pemprov Jambi, selain peningkatan literasi keuangan, tanggung jawab pelaporan juga akan menjadi lebih akuntabel. Melalui mekanisme ini juga dapat menjadi landasan pendukung Sistem Informasi Data Tunggal UMKM di Provinsi Jambi untuk melaksanakan program pemberdayaan dalam jangka panjang.

Covid-19 telah menambah dua tantangan baru bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): pengeluaran usaha yang tetap serta guncangan penawaran dan permintaan (Tarigan dkk, 2022). Transportasi, penginapan, jasa dunia usaha, jasa lainnya, bangunan, real estate, pengelolaan pemerintahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, serta administrasi pemerintahan termasuk di antara sembilan industri yang diidentifikasi yang terkena dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi. Berdasarkan rilis BPS, pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan Provinsi Jambi, sehingga semakin mendukung klaim tersebut. Sebagai bagian dari program Dumisake, Pemprov Jambi telah membuat Program PEN dan Program Bantuan Modal Usaha untuk UMKM. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan perekonomian masyarakat yang tinggal di Provinsi Jambi.

Peran Program PEN terhadap peningkatan Pendapatan UMKM dan Perekonomian Masyarakat Provinsi Jambi

Tujuan utama Program PEN Pemprov Jambi adalah untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap dapat menjalankan perusahaannya meskipun ada tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 (Safitri & Dewa, 2022). Oleh karena itu, para pelaku usaha UMKM memerlukan taktik dukungan, seperti bantuan sosial, untuk membantu mereka sukses. Dengan bantuan Program PEN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, peserta UMKM melaporkan adanya peningkatan baik output maupun pendapatan. Secara garis besar hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menunjukkan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Provinsi Jambi yang memberikan bantuan berupa barang dan peralatan telah berhasil mencapai tujuannya dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudahnya. Output dan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Jambi mengalami peningkatan ketika mulai menerima bantuan PEN. Hal ini membuktikan bahwa Program PEN membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Jambi mendapatkan penghasilan lebih..

Peran Program Bantuan Modal Usaha terhadap peningkatan Pendapatan UMKM dan Perekonomian Masyarakat Provinsi Jambi

Salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jambi, Program Dumisake, memberikan bantuan keuangan kepada dunia usaha dan merupakan perluasan dari RPJMD Provinsi Jambi untuk tahun 2021–2026. Pemerintah mencanangkan program ini sebagai upaya membantu sektor UMKM pulih dari dampak COVID-19. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian lokal dan memitigasi dampak epidemi COVID-19, bantuan modal usaha didistribusikan melalui lembaga keuangan kepada perusahaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam kerangka pemulihan ekonomi, pendekatan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses kepada UMKM di Provinsi Jambi terhadap dukungan permodalan usaha agar lebih mandiri, efisien, transparan, efektif, dan tepat sasaran dalam operasionalnya. Kendala finansial dan keuangan menjadi penghambat utama pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha kecil dan menengah (UKM) terus menaruh harapan akan lebih banyak pembiayaan dalam bentuk bantuan keuangan. Berkat inisiatif seperti Program Bantuan Modal Usaha Pemprov Jambi, pendapatan pelaku UMKM dan perekonomian masyarakat meningkat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi, namun para pelaku usaha tersebut menganggap bantuan tersebut sebagai bantuan yang mereka butuhkan. telah menerima manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan

perusahaan dan stabilitas keuangan mereka. Bantuan berupa komoditas dan peralatan Program Pemulihan Ekonomi Pemprov Jambi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM menurut penilaian efektivitasnya. Tiga target utama program bantuan ini antara lain mencapai pemulihan ekonomi, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tangguh dan mandiri, serta menetapkan prosedur bantuan yang efisien, transparan, efektif, dan tepat sasaran. Selain itu, program dukungan terhadap pelaku UMKM melibatkan dua pihak, yaitu Dinas Koperasi & UMKM milik pemerintah dan pelaku UMKM itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, L., & Handayani, T. 2021. Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. *RechtIdee*, *16*(1), 88-111.

Azhari, A. 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM di Indonesia: Pendekatan error correction model. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *12*(1), 76-88.

Friska, N. 2023. Implementasi Pemberian Bantuan Beasiswa Miskin Pada Tingkat SMA ditinjau dari Program Dumisake Jambi Mantap Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2022, *Doctoral dissertation*, Universitas Jambi

Hadi, S., Eikman, A., & Salmin, S. 2023. Strategi Bertumbuh (Scale Up) Pelaku Usaha UMKM Kabupaten Lombok Barat Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Action Research Literate*, *7*(2), 1-8.

Kadeni, N. S. 2020. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, *8*(2), 191-200.

Lumampow, K. M., Sambiran, S., & Rachman, I. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Governance*, *1*(1).

Mustafa, B. 2021. Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidrap, *Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin.

Noor, J. 2011. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nuraeni, Y. 2018. Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, *3*(1), 42-53.

Ramadano, R. 2022. Strategi Bertahan UMKM Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kerinci, *Doctoral dissertation*, Universitas Jambi.

Rijal, I. 2022. Analisis Rencana Strategi Dan Pembangunan Kabupaten Pidie Pada Sektor Pertanian 2017-2020, *Doctoral dissertation*, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Safitri, L. A., & Dewa, C. B. 2022. Analisa Kebijakan Pemberlakuan PPKM Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Industri Skala Kecil Dan Menengah Makanan dan Minuman. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, *23*(2), 97-107.

Sahputra, B. S., & Srihardjono, N. B. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Tpst 3R-Desa Mulyo Agung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, *7*(3).

Sari, N., Rizki, M., & Solihati, K. D. 2021. Dampak stimulus pemerintah untuk UMKM pada era pandemi covid-19. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*.

Simanjorang, Y., & Rahmawati, W. 2023. Strategy of the Jambi Provincial Health Service in Accelerating the Implementation of the Dumisake Program through the Jambi Sehat Card. *Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy*, *3*(2), 160-173.

Tarigan, Z. N. A. B., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. 2022. Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, *15*(1), 12-23.

Tunut, S., & Sakti, R. E. 2023. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pergeseran Lapangan Usaha PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, *5*(2), 859-870.

Yuliani, W. 2018. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, *2*(2), 83-91.